

**IMPLEMENTASI ANGGARAN RESPONSIF GENDER DI
PROVINSI SUMATERA UTARA**
Studi pada Biro Pemberdayaan Perempuan, Anak dan Keluarga Berencana Setdaprovsu

TESIS

OLEH

**SUPRIADI
NPM. 111801024**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2013**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK**

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul : Implementasi Anggaran Responsif Gender Di Provinsi Sumatera Utara Studi pada Biro Pemberdayaan Perempuan, Anak dan Keluarga Berencana Setdaprovsu

Nama : Supriadi

NPM : 111801024

Menyetujui

Pembimbing I



Dr. Warjio, MA

Pembimbing II



Drs. Kariono, MA

**Ketua Program Studi
Magister Administrasi Publik**


Dr. Warjio, MA

Direktur


Prof. Dr. Retna Astuti Kuswardani, MS

Telah diuji pada Tanggal 11 Mei 2013

Nama : Supriadi

NPM : 111801024



Panitia Penguji Tesis :

Ketua : Isnaini, SH, M.Hum
Sekretaris : Ir. Azwana, MP
Pembimbing I : Dr. Warjio, MA
Pembimbing II : Drs. Kariono, MA
Penguji Tamu : Dr. Heri Kusmanto, MA

PERNYATAAN KEORISINILAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Supriadi
NPM : 111801024

Dengan ini menyatakan bahwa Tesis ini dengan judul :

“Implementasi Anggaran Responsif Gender Di Provinsi Sumatera Utara Studi pada Biro Pemberdayaan Perempuan, Anak dan Keluarga Berencana Setdaprovsu”

Adalah benar merupakan hasil penelitian yang saya kerjakan sendiri tanpa meniru atau menjiplak hasil penelitian orang lain.

Apabila di kemudian hari bahwa tesis ini tidak orisinal dan merupakan hasil plagiat, maka saya bersedia di cabut gelar magister yang saya peroleh.

Demikian pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya.

Medan, Mei 2013

Yang menyatakan,



Supriadi

ABSTRAK

Implementasi Anggaran Responsif Gender di Provinsi Sumatera Utara (Studi di Biro Pemberdayaan Perempuan, Anak dan Keluarga Berencana Setdaprovsu)

Nama : Supriadi
NIM : 111801024
Program : Magister Administrasi Publik
Pembimbing I : Dr. Warjio.MA
Pembimbing II : Drs. Kariono, MA

Integrasi gender dalam proses perencanaan dan penganggaran merupakan suatu langkah yang relatif baru karena pada awalnya proses pengintegrasian gender dalam pembangunan lebih terfokus pada upaya untuk memperkuat prasyarat implementasi Pengarusutamaan Gender (PUG) seperti membangun komitmen pengambil kebijakan, penyediaan alat analisa gender, serta kelembagaan PUG.

Perumusan masalah yang dirumuskan yaitu Bagaimana Impelementasi Anggaran yang Responsif Gender di Provinsi Sumatera Utara. Jenis penelitian ini adalah metode survey dengan analitik kausalitas dari metode kuantitatif.

Populasi sasaran dalam penelitian ini adalah seluruh Aparat pada Biro Pemberdayaan Perempuan, Anak dan Keluarga Berencana Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara. Sedangkan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah orang-orang yang menjadi kunci dalam memberikan data yang akan diteliti,

Hasil-hasil penelitian lapangan yang meliputi ketersediaan anggaran melalui penyusunan Rencana Kerja (Renja) selanjutnya penyusunan Plapon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS), penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) sesuai KUA, penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), penelitian dan pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), pencairan dana dan pelaksanaan kegiatan serta pembuatan laporan pertanggungjawaban anggaran yang digunakan.

Jika dilihat dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), maka masih belum dapat dilihat secara jelas berapa sasaran untuk laki-laki maupun untuk perempuan sehingga didalam pelaksanaannya terkadang karena masih adanya perbedaan persepsi dalam istilah gender, maka sasaran yang hadir masih banyak perempuan dari pada laki-laki, hal ini mengakibatkan terjadinya ketimpangan informasi sedangkan para pengambil keputusan disemua lapisan stakeholder masih banyak laki-laki. Diperlukan analisis dalam penyusunan indikator kinerja yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran dengan mempedomani Term of Reference penyusunan anggaran yang responsif gender.

Kata Kunci

- Pengarusutamaan Gender; Anggaran Responsif Gender; Anggaran Berbasis Kinerja

ABSTRAK

Implementation of Gender Responsive Budgeting in North Sumatra Province (Studies in Women's Empowerment Bureau, Child and Family Planning Setdaprovsu)

N a m a: Supriadi

N I M: 111801024

Program: Master of Public Administration

Supervisor I: Dr. Warjio.MA

Supervisor II: Drs. Kariono, MA

Gender integration in the planning and budgeting process is a relatively new step because in the beginning process of integrating gender in development is more focused on efforts to strengthen the implementation of Gender Mainstreaming prerequisites (PUG) as policy makers to build commitment, provision of gender analysis tools, as well as institutional PUG.

Formulation of the problem formulated How Gender Responsive Budget Implementation in the province of North Sumatra. This research is a survey method with analytic causality of quantitative methods.

Target population in this study were all officials in the Bureau of Women's Empowerment, Child and Family Planning Secretariat of North Sumatra Province. The sample used in this study are the ones who become key in providing the data to be examined,

The results of field research that includes the availability of the budget through the preparation of the Work Plan (working plan) further preparation Plapon Budget Priority (PPAS), the preparation of the Budget Public Policy (KUA), preparation of the Action Plan Budget (RKA) corresponding KUA, the preparation of the Budget Implementation Document (DPA), research and validation Budget Implementation Document (DPA), the disbursement of funds and implementation of activities and budget accountability reporting is used.

If seen in the Budget Implementation Document (DPA), it still can not be seen clearly how the target for men and for women so that in practice sometimes because of the persistence of gender differences in terms of perception, the goals of which present many of the male-female man, this has led to discrepancies while decision makers in all layers of stakeholders are still a lot of men. Analysis is required in the preparation of the performance indicators set out in the Budget Implementation Document guided by terms of reference of gender responsive budgeting.

Keyword

- Gender Mainstreaming;- Gender Responsive Budgeting;- Performance-Based Budgeting

KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis sanjungkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis yang berjudul **"Implementasi Anggaran Responsif Gender di Provinsi Sumatera Utara (Studi di Biro Pemberdayaan Perempuan, Anak dan Keluarga Berencana Setdaprovsu)"**. Tesis ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Magister Administrasi Publik pada Program Studi Magister Administrasi Publik.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof.DR.A.Ya'kub Matondang,MA selaku Rektor Universitas Medan Area beserta segenap jajarannya yang telah mendorong berbagai proses belajar mengajar di Program Magister Administrasi Publik Universitas Medan Area dari waktu ke waktu semakin baik.
2. Ibu Prof.Dr.Ir.Retna Astuti Kuswardani,MS selaku Direktur Pascasarjana Universitas Medan Area
3. Bapak Dr.Warjio,MA selaku Ketua Program Studi Magister Administrasi Publik Universitas Medan Area dan selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak memberikan arahan dan perbaikan dalam penyempurnaan penulisan penelitian ini.
4. Bapak Drs.Kariono,MA selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak memberikan arahan dan perbaikan dalam penyempurnaan penulisan penelitian ini.
5. Ibu Drg.Iis Faizah Hanum,M.Kes selaku Kepala Biro Pemberdayaan Perempuan, Anak dan Keluarga Berencana Setdaprovsu yang telah memberikan izin dan masukan dalam penulisan penelitian ini.

Penulis menyadari bahwa Tesis ini masih banyak kekurangannya, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis membuka diri untuk menerima saran maupun kritikan yang konstruktif, dari para pembaca demi penyempurnaannya dalam upaya menambah khasanah pengetahuan dan bobot dari Tesis ini. Semoga Tesis ini dapat bermanfaat, baik bagi perkembangan ilmu pengetahuan maupun bagi dunia usaha dan pemerintah.

Medan, April 2013

P e n u l i s



SUPRIADI

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN PERSETUJUAN.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
ABSTRAKSI	iii
PERNYATAAN.....	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii

BAB I : PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Perumusan Masalah	6
1.3. Tujuan Penelitian	7
1.4. Manfaat Hasil Penelitian.....	7
1.5. Kerangka Penelitian.....	8

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengertian Implementasi Kebijakan	10
2.2. Konsep Implementasi Kebijakan Publik	14
2.3. Aspek Implementasi	14
2.4. Teori Model Implementasi	15
2.5. Pengarusutamaan Gender	17
2.6. Anggaran Berbasis Kinerja	19
2.7. Anggaran Responsif Gender.....	21

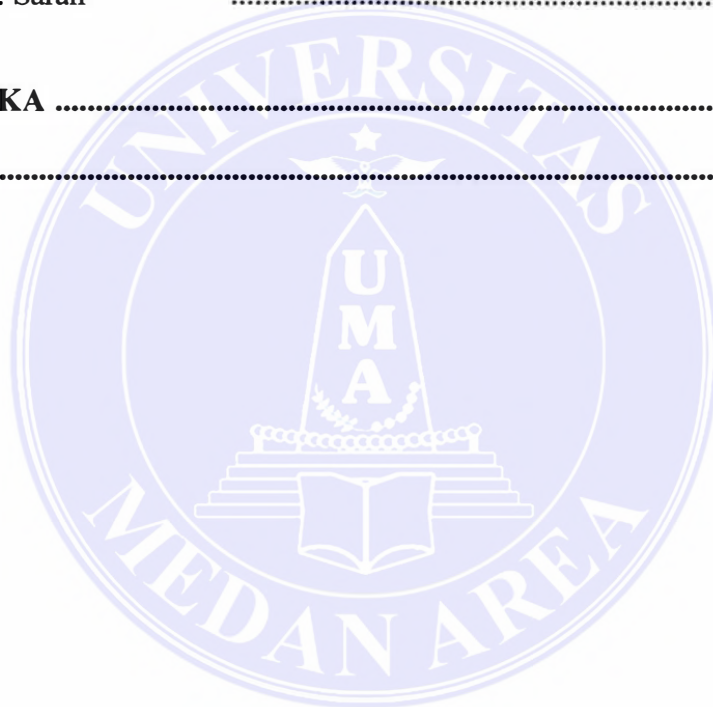
BAB III : METODE PENELITIAN

3.1. Bentuk Penelitian	24
3.2. Populasi Sasaran	25
3.3. Teknik Pengumpulan Data dan Pengukurannya	26
3.4. Operasionalisasi Variabel	27
3.5. Teknik Analisis Data	32

BAB IV : GAMBARAN UMUM

4.1. Kedudukan, Tugas dan Fungsi	34
4.2. Potensi Sumber Daya Manusia	35
4.3. Visi dan Misi	37
4.4. Tujuan dan Sasaran	38

BAB V	: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
5.1.	Penyusunan Rencana Kerja (Renja)	57
5.2.	Penyusunan Plapon Prioritas Anggaran Sementara	64
5.3.	Penyusunan Rencana Kerja Anggaran dan Pencairan dana ...	65
5.4.	Elemen-elemen Utama Anggaran Berbasis Kinerja	69
5.5.	Mengintegrasikan Gender Dalam Anggaran Berbasis Kinerja	72
5.6.	Peluang Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja Responsif Gender	74
5.7.	Kegunaan Anggaran Responsif Gender	75
5.8.	Monitoring Kegunaan Anggaran Responsif Gender	88
5.9.	Evaluasi Kegunaan Anggaran	89
5.10.	Laporan Penggunaan Anggaran Pengarusutamaan Gender...	90
BAB VI	: KESIMPULAN DAN SARAN	
6.1.	Kesimpulan	92
6.2.	Saran	92
DAFTAR PUSTAKA		94
LAMPIRAN		97



DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Sample/Responden.....	26
Tabel 4.1 Berdasarkan jabatan.....	36
Tabel 4.2 Berdasarkan golongan.....	36
Tabel 4.3 Berdasarkan pendidikan.....	36
Tabel 5.1. Perbandingan Anggaran Responsif Gender dengan APBD 2010 – 2012.....	59
Tabel 5.2 TOR kegiatan responsif gender.....	56
Tabel 5.3 Program/kegiatan dan anggaran tahun 2011.....	77
Tabel 5.4 Daftar kegiatan tahun 2012.....	82



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Paket perundang-undangan bidang Keuangan Negara mencakup Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP), Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga.

Pembenahan aspek pengelolaan keuangan negara, yang difokuskan pada pengaturan hubungan hukum antar lembaga Legislatif dan lembaga Eksekutif dalam penetapan Undang - Undang Anggaran Pendapatan Belanja Negara dituangkan dalam Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 dan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2004 tersebut. Dalam Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 dimaksud antara lain memperjelas peran lembaga Legislatif maupun Eksekutif dalam penyusunan dan penetapan Anggaran Pendapatan Belanja Negara menjadi Undang-Undang, kejelasan peran tersebut merupakan suatu keharusan untuk dapat menjamin terselenggaranya transparansi di bidang penganggaran.

Sementara itu pengaturan hubungan hukum antar instansi dalam lembaga Eksekutif dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Anggaran Pendapatan Belanja Negara yang merupakan aspek administratif pengelolaan keuangan negara dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara.

Lahirnya berbagai Undang-Undang dan peraturan tersebut telah menjadikan perubahan yang mendasar dalam sistem perencanaan dan penganggaran. Perubahan pertama diawali dengan adanya pola pengelolaan keuangan negara yang sebelumnya menekankan pada Public Financial Administration (Pengadministrasian Keuangan Negara) menjadi Public Financial Management (Pengelolaan Keuangan Negara). Perubahan-perubahan yang terjadi pada pengelolaan keuangan negara adalah perubahan dalam hal perencanaan dan penyusunan anggaran, pelaksanaan anggaran, termasuk akuntansi dan pelaporannya, serta sampai dengan pemeriksaan pengelolaan keuangan negara oleh pemeriksa eksternal (Badan Pemeriksa Keuangan). Perubahan-perubahan tersebut didorong oleh beberapa faktor antara lain perubahan yang berlangsung begitu cepat di bidang politik, desentralisasi, dan berbagai tantangan pembangunan yang dihadapi pemerintah, yang membutuhkan dukungan sistem penganggaran yang lebih responsif, yang dapat memfasilitasi upaya memenuhi tuntutan peningkatan kinerja dalam artian dampak pembangunan, kualitas layanan efisiensi pemanfaatan sumberdaya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku – buku

- Abdullah, Irwan, 2001, *Seks, Gender dan Reproduksi Kekuasaan*, Yogyakarta, Tarawang Press
- Arifin, Bustanul dan Abdul Sahid, 2001, *Panduan Analisis Anggaran*, Jakarta, FITRA.
- Astuti, Tri Marhaeni, 2002, *Perempuan Perkasa di Tengah Hutan dalam Jurnal Studi Wanita*, Pusat Studi Wanita, UI, Jakarta.
- Fakih, Mounsur, 1996, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Farha, Ciciek, 1999, *Ikhtiar Mengatasi Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Penerbit Perserikatan SOLidaritas Perempuan, Jakarta.
- Frameworks of Performance Oriented Budgeting*, Newyork, UNIFEM
- Krisnawaty, Tati, 1995, *Solidaritas Perempuan; Profil dan Mekanisme Rekruting Perempuan Pekerja Migran di empat propinsi*, draft penelitian, tidak dipublikasikan.
- Mastuti, Sri & Rinusu, 2003, *APBD Responsif Gender*, Jakarta, CIBA
- Nasikun, 1990, *Peningkatan Peranan Wanita dalam Pembangunan*, dalam populasi no.1 Tahun 1990, penerbit PPK UGM
- Nazir, Moh, 1999, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Ndraha, Taliziduhu, 1997, *Budaya Organisasi*, Rhineke Cipta, Jakarta.
- , 1997, *Metodologi Ilmu Pemerintahan*, Rhineke Cipta, Jakarta.
- , 2001, *Ilmu Pemerintahan Jilid I, II, III, IV, V*, Buku Ilmu Pemerintahan Kerjasama IIP – UNPAD, Jakarta.
- Rasyid, M.Ryaas, 2000 *Makna Pemerintahan*, Yasrif Watampone, Jakarta.
- Rukmana, Nana D.W. 2006, *Strategic Partnerig For Education Management*, Alfabeta, Semarang.

Saptari, Ratna dan Holzner, Brigitte, 1997, *Perempuan Kerja dan Perubahan Sosial*, Jakarta, Pustaka Utama, Grafiti.

Sharp. Ronda 2003, *Budgeting for Equity. Gender Budget Initiatives within a Framework of Performance Oriented Budgeting*. New York: UNIFEM

Siahaan, Asima Yanti, 2003, *Desentralisasi dalam Perspektif Gender*, dalam *Proceeding Semiloka Isu Gender dalam Implementasi Otonomi Daerah*, diterbitkan Laboratorium Otonomi Daerah FISIP USU.

Singarimbun, Masri dan Sofyan Efendi, 1989, *Metode Penelitian Survey*, LP3ES, Jakarta.

Soetrisno, Loekman, 1985, *Kemiskinan, Perempuan dan Pemberdayaan*, Steers, Richard M, *Efektivitas Organisasi (kaidah perilaku)*, PPM Erlangga, Jakarta.

Widjaja, Haw, 2005, *Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Rajawali Pers, Jakarta.

Winamo, Budi, 2012, *Kebijakan Publik, Teori, Proses dan Studi Kasus*, CAPS, Yogyakarta

B. Majalah/Artikel/Jurnal

Soetjipto, Ani 2003, *Undang-Undang Pemilu, Implementasinya Untuk Perempuan*, Kompas.

PATTIRO, 2008, *Modul Pelatihan Advokasi Penganggaran Berbasis Kinerja Responsif Gender*.

Modul Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, 2010.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Kepmendagri No.29 tahun 2002 tentang *Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Cara Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran dan Belanja Daerah*.

Kepmendagri No.132 tahun 2003 tentang *Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah*.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 Tahun 2006 tentang *Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*.

Peraturan Pemerintah No.105 tahun 2000 tentang *Pengelolaan Keuangan Daerah*.

Peraturan Pemerintah No.20 tahun 2010 tentang *Rencana Kerja Pemerintah*.

Peraturan Pemerintah No.21 tahun 2010 tentang *Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga*.

Peraturan Presiden Republik Indonesia No.7 Tahun 2005 tentang *Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM)*.

Statistik Gender dan Analisis Indonesia 2002-2003, Jakarta, BPS, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan JICA.

Undang-Undang Republik Indonesia No.17 tahun 2003 tentang *Keuangan Negara*.

Undang-Undang Republik Indonesia No.1 tahun 2004 tentang *Perbendaharaan Negara*.

Undang-Undang Republik Indonesia No.15 tahun 2004 tentang *Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan*.

Undang-Undang Republik Indonesia No.25 tahun 2004 tentang *Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional*

Undang-Undang Republik Indonesia No.32 tahun 2004 tentang *Pemerintah Daerah*.

Undang-Undang Republik Indonesia No.33 tahun 2004 tentang *Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah*.

MATRIK ANALISIS GAP

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Pilih kebijakan/ program/ kegiatan yang akan dianalisis Identifikasi dan tuliskan tujuan dari kebijakan/program/ kegiatan	Data pembuka wawasan	Isu gender			Kebijakan dan rencana kedepan		Pengukuran hasil	
		Faktor kesenjangan	Sebab kesenjangan internal	Sebab kesenjangan eksternal	Reformulasi tujuan	Rencana aksi	Data dasar (base-line)	Indikator gender

PERTANYAAN WAWANCARA

Assalammualaikum wr.wb

Salam sejahtera.

Dengan ini saya mohon kiranya kepada Bapak/Ibu berkenan dan bersedia serta membantu dalam memberikan data atas pertanyaan wawancara saya ini. Nama saya adalah SUPRIADI merupakan Mahasiswa Magister Administrasi Publik Program Pasca Sarjana Universitas Medan Area dan saat ini sedang menyelesaikan penulisan tugas akhir atau “TESIS”.

Saya mohon bantuan dan dukungan Bapak/Ibu untuk memberikan data dan informasi guna penyelesaian penelitian saya yang berjudul IMPLEMENTASI ANGGARAN RESPONSIF GENDER DI PROVINSI SUMATERA UTARA.

Maksud dari pertanyaan wawancara ini adalah untuk mengumpulkan data dan informasi dalam penelitian yang saya lakukan, guna penyempurnaan penelitian untuk menyelesaikan tugas akhir atau Tesis, dalam rangka memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Master di Program Pasca Sarjana Magister Administrasi Publik Universitas Medan Area

SUPRIADI

I. IDENTITAS RESPONDEN

1. Nama :
2. Jenis Kelamin : a. Laki-laki
b. Perempuan
3. Tempat/Tgl Lahir :
4. Umur :
5. Agama : Islam
6. Suku :
 - a. Mandailing
 - b. Batak
 - c. Melayu
 - d. Minang
 - e. Jawa
 - f. Lain-lain (sebutkan)
7. Pendidikan terakhir :
 - a. SMA
 - b. Akademi
 - c. Diploma
 - d. Sarjana (S.1)
 - e. Pasca Sarjana
 - f. Lain-lain (sebutkan)
8. Status Perkawinan : Menikah
9. Jabatan :
10. Unit Kerja : Biro Pemberdayaan Perempuan, Anak dan Keluarga Berencana Setdaprovsu

II. PERTANYAAN

1. Kepala Biro Pemberdayaan Perempuan, Anak dan Keluarga Berencana Setdaprovsu
 - a. Mohon penjelasan tentang Indikator kinerja pada Biro Pemberdayaan Perempuan, Anak dan Keluarga Berencana Setdaprovsu pada tahun 2011
 - b. Mohon penjelasan tentang indikator kinerja pada Biro Pemberdayaan Perempuan, Anak dan Keluarga Berencana Setdaprovsu tahun 2012.



UNIVERSITAS MEDAN AREA

PROGRAM PASCASARJANA

Program Studi : *Magister Administrasi Publik - Magister Agribisnis*
Magister Ilmu Hukum - Magister Psikologi
Jalan Setia Budi No. 79-B Telp. (061) 8201994 Fax. (061) 8226331 Medan 20120

Nomor : 276 /Wadir.Ak/PPS-UMA/2013
Lamp. : -
Hal : Izin Penelitian

Medan, 13 Februari 2013

Yth. Kepala Biro Pemberdayaan Perempuan,
Anak Dan Keluarga Berencana Setdaprovsu
di -
Medan

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan adanya tugas akhir mahasiswa Program Pascasarjana *Magister Administrasi Publik Universitas Medan Area*, kami mohon kesediaan Saudara memberikan izin penelitian kepada mahasiswa yang tersebut namanya dibawah ini :

Nama : Supriadi
NPM : 111801024
Program Studi : *Magister Administrasi Publik*
Judul Tesis : Implementasi Pelaksanaan Anggaran Responsif Gender Di Provinsi Sumatera Utara (Studi Di Biro Pemberdayaan Perempuan, Anak Dan Keluarga Berencana Setdaprovsu)

- Untuk melaksanakan Pengambilan data di instansi yang Saudara pimpin sebagai bahan melengkapi tugas-tugas penulisan Tesis pada Program Pascasarjana *Magister Administrasi Publik Universitas Medan Area*.

Demikian disampaikan, atas bantuan dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.



Wakil Direktur Bidang Akademik,

Ir. Erwin Pane, MS

Tembusan :

1. Ka. Prodi MAP PPs UMA
2. Mahasiswa Ybs.
3. Peringgal.



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI

Jalan P.Diponegoro Nomor 30 Telephon 4156000
M E D A N

SURAT KETERANGAN

Nomor : 321.1 /PPAKB/III/2013

Sehubungan dengan surat Direktur Program Pascasarjana Universitas Medan Area Nomor : 276/Wadir.Ak/PPS-UMA/2013, tanggal 13 Februari 2013, tentang Izin Penelitian, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : SUPRIADI
NPM : 111801024
Judul Tesis: Implementasi Pelaksanaan Anggaran Responsif Gender di Provinsi Sumatera Utara (Studi di Biro Pemberdayaan Perempuan, Anak dan Keluarga Berencana Setdaprovsu)

Telah selesai melaksanakan pengambilan data/penelitian di Biro Pemberdayaan Perempuan, Anak dan Keluarga Berencana Setdaprovsu sejak tanggal 14 Februari s/d 7 Maret 2013.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Dikeluarkan di: Medan,
Pada tanggal : 7 Maret 2013
an. GUBERNUR SUMATERA UTARA
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
Ub.

KEPALA BIRO PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
ANAK DAN KELUARGA BERENCANA

Drg. IIS FAIZAH HANUM, M.Kes
PEMBINA TK. I
NIP.19660706 199203 2 006

Tembusan :

Bapak Sekdaprovsu dp.Bapak Asisten Kesos, sebagai laporan